

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Kualitas Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Penertiban Parkir di Sekitar Jalan Otto Iskandar Dinata

Kualitas kerja lembaga aparatur Negara sebagai abdi masyarakat harus selalu diupayakan untuk terus ditingkan sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kualitas kerja merupakan kesesuaian antara hasil kerja dengan standar yang telah ditentukan, sebagai totalitas fitur-fitur dan karakteristik-karakteristik dari produk atau layanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu.

kualitas kerja dan nilai hasil kerja Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan penertiban parkir di sekitar jalan Otto Iskandar Dinata dapat dilihat dari aspek penampilan, kehandalan, kekuatan, serta daya seni.

Untuk mengetahui kualitas Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan penertiban parkir dan melakukan observasi lapangan untuk memperoleh informasi tentang kualitas kerja aparatur dari aspek penampilan, kehandalan, kekuatan, serta daya seni.

Kualitas kerja merupakan dimensi pertama yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja. Dalam kualitas kerja terdapat empat aspek yang dapat mengukur dimensi kualitas kerja. Aspek tersebut antara lain adalah aspek Penampilan,

kehandalan, kekuatan dan daya seni. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dilapangan, diketahui bahwa secara aspek penampilan, kualitas kinerja masih belum dapat terpenuhi dengan baik hal tersebut ditunjukkan oleh masih belum lengkapnya seragam dan atribut yang dipakai oleh aparatur Dinas Perhubungan dan juga sarana, prasarana, fasilitas dan alat yang masih belum memadai. Dimensi kualitas kerja berdasarkan aspek kehandalan masih belum terpenuhi dengan baik, hal tersebut ditunjukkan oleh belum maksimalnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan aspek kekuatan dimensi kualitas kerja belum dapat terpenuhi secara maksimal karena dalam pelaksanaan penertiban parkir liar masih ada beberapa kendaraan yang diparkir di tempat larang parkir yang tidak ditindak, kemudian berdasarkan aspek daya seni dimensi kualitas kerja masih belum tercapai karena pengaturan penempatan kendaraan yang diparkir di tempat parkir resmi masih belum terlihat rapih dan teratur.

Kualitas dalam pengukuran kinerja dinas perhubungan tentang penertiban parkir di sekitar jalan otto iskandar dinata masih bisa dikatakan belum berjalan secara optimal dilihat dari beberapa aspek yang belum tercapai. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

4.1.1. Penampilan fisik Aparatur dan sarana Dinas Perhubungan Kota Bandung

Dalam Penertiban Parkir di Sekitar Jalan Otto Iskandar Dinata

Penampilan merupakan salah satu indikator dalam aspek kualitas kerja. Tangible adalah faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen dari segi visual (berhubungan dengan lingkungan fisik). Penampilan yang baik akan mempengaruhi persepsi masyarakat.

Dimensi penampilan juga merupakan salah satu sumber yang mempengaruhi harapan konsumen, karena dengan penampilan yang baik, maka harapan, kepercayaan dan rasa hormat masyarakat terhadap aparatur akan meningkat, maka sangat penting bagi Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk memperhatikan aspek penampilan, baik itu penampilan fisik aparatur, maupun penampilan dari sarana dan prasarana, alat serta bahan untuk pelaksanaan operasional.

Penampilan fisik aparatur Dinas perhubungan dapat dilihat dari kelengkapan seragam yang dikenakan. Aparatur tim penertiban parkir liar sampai ke juru parkir resmi pada umumnya diwajibkan menggunakan seragam, hal tersebut dilakukan sebagai identitas petugas dilapangan dan untuk menghindari oknum yang dapat mengelabui para konsumen yang tidak mengerti, pembagian seragam dan atribut tersebut dilakukan setahun sekali kepada petugas tim penertiban dan juru parkir.

Gambar 4.1
Seragam dan atribut juru Parkir Resmi



Sumber: Hasil Observasi Peneliti di jl.Otista Tahun 2014

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan, peneliti menemukan bahwa dalam penertiban Parkir ada beberapa petugas yang tidak memakai seragam dan atribut lengkap, hal tersebut juga dijumpai pada juru parkir resmi, tidak semua bahkan hampir kebanyakan juru parkir resmi yang tidak memakai atribut resmi.

Tidak lengkapnya seragam dan atribut yang digunakan petugas adalah karena pembagian seragam atribut dan kelengkapan lain yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yang hanya dilakukan setahun sekali, sehingga jika dilihat dari waktu yang cukup lama dalam pemberian seragam dan atribut kepada petugas dapat di maklumi apabila petugas terkadang tidak mengenakan seragam dan atribut lengkap seperti sebagaimana mestinya karena petugas tidak memiliki baju seragam dan atribut lebih ketika kotor atau rusak. Tetapi hal tersebut sangat mempengaruhi terhadap

respon ketertarikan konsumen parkir, karena jika dilihat dari ketidak lengkapnya seragam dan atribut yang digunakan para petugas tidak memberikan kesan lebih dari tempat parkir liar yang kondisinya sama tetapi biasanya lebih dekat dari tempat tujuan para konsumen parkir. Sehingga konsumen parkir lebih tertarik memarkirkan kendaraanya ditempat parkir liar.

Gambar 4.2
Juru Parkir Resmi tanpa seragam dan atribut



Sumber: Hasil Observasi Peneliti di Jl.Otista Tahun 2014

Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Mengemukakan bahwa sarana adalah segala jenis

peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja.

Mengenai ketersediaan fasilitas parkir aparaturnya Dinas Perhubungan menjelaskan bahwa fasilitas parkir adalah berupa pelataran parkir, marka dan rambu jalan, dan fasilitas penunjang parkir seperti pos petugas, lampu penerangan, pintu keluar masuk, alat pencatat waktu elektronik dan pintu elektronik pada fasilitas parkir dengan pintu masuk otomatis. Sedangkan untuk penertiban parkir liar, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas perhubungan adalah kendaraan operasional yaitu 2 unit truk dan 4 unit mobil bak, Gembok 190 Unit, Rantai 30 Set.

Adapun mengenai pemeliharaan fasilitas parkir, aparaturnya Dinas Perhubungan mengatakan bahwa perihal pemeliharaan fasilitas parkir diatur dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/Hk.105/DRJD/96. Pemeliharaan fasilitas parkir tersebut untuk menjamin agar pelataran tetap dalam kondisi baik, pemeliharaan dilakukan dengan cara sekurang-kurangnya setiap hari pelataran parkir dibersihkan agar bebas dari sampah dan air yang tergenang, pelataran parkir yang sudah berlubang-lubang atau rusak ditambal atau diperbaiki, secara rutin pada saat tertentu, pelapisan (overlay) pada perkerasan pelataran parkir perlu dilakukan.

Untuk memelihara pelataran parkir itu, perlu diketahui hal-hal berikut seperti Pada fasilitas parkir di badan jalan, penambalan atau pelapisan (overlay) dilakukan sesuai dengan pemeliharaan badan jalan oleh instansi pembina jalan. Pada fasilitas

parkir di luar badan jalan, pengelola parkir wajib menyiapkan fasilitas / peralatan pemeliharaan perkerasan pelataran parkir, Seperti pemeliharaan marka dan rambu jalan secara berkala dengan pengecatan marka jalan kembali agar terlihat jelas oleh pengemudi. Bersamaan dengan pembersihan pelataran parkir, bagian marka jalan harus dibersihkan secara khusus. Rambu jalan harus diganti apabila sudah tidak terlihat jelas tulisannya atau sudah rusak. Secara rutin daun rambu jalan harus dibersihkan agar tidak tertutup oleh kotoran.

Fasilitas Penunjang Parkir yang memerlukan pemeliharaan seperti pos petugas, lampu penerangan, pintu keluar dan masuk, alat pencatat waktu elektronik dan pintu elektronik pada fasilitas parkir dengan pintu masuk otomatis

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan, diketahui bahwa ketersediaan beberapa fasilitas, sarana dan prasarana juga alat belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti misalnya berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, ketersediaan mobil petugas penertiban adalah sebyak 4 unit, namun dalam observasi yang dilakukan peneliti menemukan bahwa mobil petugas hanya ada satu unit, lalu ketersediaan gembok seharusnya berjumlah 190 unit, namun fakta yang peneliti lihat di lapangan, ketersediaan gembok roda kendaraan roda 4 hanya berjumlah 50 unit.

Gambar 4.3
Perlengkapan Gembok Untuk Kendaraan Roda 4



Sumber: Hasil Observasi Peneliti Tahun 2014

Pemeliharaan fasilitas pun nampak belum maksimal dilakukan sesuai ketentuan, hal tersebut dapat dilihat dari penampilan beberapa fasilitas yang terlihat kurang maksimal, dan juga tempat parkir resmi yang terlihat masih sangat berantakan.

Mengenai fasilitas, sarana dan prasarana yang terdapat di tempat parkir, masyarakat pengguna tempat parkir resmi berpendapat bahwa fasilitas dan kapasitas tempat parkir yang ada masih belum memadai dan kondisi tempat parkir masih kurang baik, selain itu beberapa atribut juru parkir yang tidak lengkap, seperti tidak menggunakan peluit dan lampu tongkat sehingga tidak dapat membantu pengguna parkir secara maksimal dalam memarkirkan kendaraan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penampilan merupakan salah satu aspek penting dalam kualitas kerja, berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa secara aspek penampilan, aparatur Dinas Perhubungan belum dapat dikatakan telah memenuhi dimensi kualitas kerja dikarenakan dinas perhubungan hanya dapat menyediakan seragam selama satu tahun sekali bagi para juru parkir dan kurangnya pengawasan terhadap fasilitas pendukung dalam penertiban parkir liar, salah satunya seperti penggantian secara cepat gembok roda yang sudah rusak dan tidak dapat diperbaiki kembali sehingga dapat memperlancar proses kerja petugas penertiban.

4.1.2. Keandalan Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam

Penertiban Parkir di Sekitar Jalan Otto Iskandar Dinata

Kehandalan merupakan kemampuan aparatur yang diharapkan dapat diandalkan dalam menunjukkan layanan yang dijanjikan dengan tanggung jawab dan akurat kepada masyarakat. Keandalan aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam penertiban parkir merupakan salah satu komitmen Dinas Perhubungan dalam rangka menciptakan Kota Bandung yang Tertib, Aman, Nyaman, dan Bermartabat.

Kehandalan merupakan aplikasi dari sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan penertiban parkir sebagai bentuk dedikasi terhadap masyarakat. Keandalan dapat diukur secara konseptual dan operasional untuk memberikan hasil yang maksimal dalam rangka penertiban parkir di Kota Bandung. Aspek yang menjadi ukuran dari keandalan tersebut meliputi kinerja, kemampuan, kekuatan,

kesanggupan dalam penertiban parkir di Kota Bandung khususnya sekitar jalan Otto Iskandar Dinata.

Kualitas kerja aparaturnya Dinas Perhubungan dapat diukur salah satunya oleh aspek kehandalan aparaturnya Dinas Perhubungan dalam Penertiban Parkir. Untuk mengetahui kehandalan aparaturnya Dinas Perhubungan dalam penertiban parkir peneliti melakukan wawancara kepada Aparatur Dinas Perhubungan, Aparatur UPT Parkir, juru parkir dan masyarakat pengguna parkir resmi dan pengguna parkir liar.

Penertiban Parkir liar merupakan sebuah aktivitas pengaturan situasi pemarkiran kendaraan dari kawasan larang parkir ke kawasan parkir resmi. Dalam rangka penertiban parkir liar dilakukan beberapa tahapan kegiatan, tahapan kegiatan tersebut dimulai dari kegiatan SIDAK yang dilakukan oleh tim Gembok sebagai bagian dari Dinas Perhubungan Kota Bandung, sampai penyediaan sarana dan parasaran di tempat parkir resmi dan pelayanan yang diberikan oleh juru parkir resmi sehingga masyarakat dapat lebih disiplin dan tertarik untuk memarkirkan kendaraannya di tempat parkir resmi dan tidak akan melakukan parkir ditempat yang tidak diperbolehkan, seperti dibadan jalan yang tidak ada marka parkir, di kawasan yang memiliki rambu larang parkir bahkan ditrotoar.

Pelaksanaan Penertiban parkir liar dilakukan setiap hari dan lokasi penertiban diputuskan pada saat para petugas melakukan apel pagi, yang bertujuan agar tidak terjadi kebocoran target daerah operasi penertiban. Sebagai upaya yang dilakukan oleh petugas untuk penertiban dilakukan pengembosan ban kendaraan, pengembosan ban kendaraan yang ditinggal pemiliknya dan pengangkutan

kendaraan roda dua yang ditinggal pemiliknya serta penderekan kendaraan kendaraan roda 4 yang parkir di kawasan terlarang.

Dari keterangan tersebut diketahui bahwa sebagai upaya penertiban parkir liar Aparatur Dinas Perhubungan melakukan kegiatan penertiban setiap hari, rangkaian kegiatan penertiban tersebut antarlain dilakukan SIDAK pada kendaraan yang parkir di tempat terlarang, dan dilakukan tindakan pengembosan, penggembokan dan pengangkutan kendaraan yang parkir di kawasan dilarang parkir oleh tim penggembokan. Selanjutnya dalam pelaksanaan penertiban, dibentuk tim ploting dan tim hunting. Tim ploting bertugas untuk mengawasi daerah-daerah larang parkir dari pagi sampai sore. Sedangkan tim hunting bertugas untuk melakukan SIDAK dengan cara berkeliling ke daerah-daerah yang diduga terjadi banyak parkir liar dan menimbulkan kemacetan.

Penertiban parkir liar juga harus ditunjang oleh kehandalan juru parkir dalam melayani dan membantu masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya. Kehandalan juru parkir dilapangan terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia dan juga fasilitas yang memadai sehingga juru parkir kesulitan untuk melaksanakan tugasnya dalam membantu parkir dengan maksimal.

Persepsi masyarakat mengenai kehandalan juru parkir masih kurang baik. Masyarakat pengguna parkir resmi berpendapat bahwa kehandalan juru parkir masih kurang, juru parkir kurang dapat membantu masyarakat dalam memarkirkan kendaraan dan kurang dapat mengatur posisi kendaraan sehingga masyarakat sulit untuk memarkirkan dan juga sulit untuk mengambil kendaraan yang diparkir.

Kehandalan petugas juru parkir yang masih kurang dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat memilih memarkirkan kendaraannya di tempat parkir liar. Masyarakat berpendapat bahwa tidak ada bedanya memarkirkan kendaraan di tempat parkir resmi dan di tempat parkir liar, karena juru parkir resmi tidak dapat membantu banyak ketika masyarakat akan memarkirkan kendaraan.

Gambar 4.4
Jadwal Penertiban

RENCANA PENERTIBAN PARKIR

- ◉ SHIFT PERTAMA : PUKUL 09.00 S/D 13.00 WIB
- ◉ SHIFT KEDUA : PUKUL 13.00 S/D 17.00 WIB
- ◉ WAKTU PENERTIBAN HARI KERJA :
- ◉ SENIN, SELASA, RABU DAN KAMIS OPERASI PENERTIBAN PARKIR DILAKSANAKAN PENGGEMBOKAN - HUNTING /MOBILE
- ◉ JUM'AT, SABTU DAN MINGGU OPERASI PENERTIBAN SECARA FLOATING.

Sumber: Hasil Rapat Evaluasi Tim Penertiban Parkir

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti menemukan bahwa petugas tim plotting yang seharusnya bertugas di kawasan larang parkir dan kawasan parkir resmi untuk mengawasi pengelolaan parkir dari pagi hingga sore, tidak selalu berada di tempat tersebut sesuai waktu yang telah ditetapkan. Tim hunting pun hanya berkeliling sekali saja, padahal seharusnya petugas berkeliling

selama dua jam sekali dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, kemudian dari pengamatan yang dilakukan di tempat parkir resmi, peneliti melihat bahwa petugas juru parkir kurang dapat membantu masyarakat dalam memarkirkan kendaraannya. dan berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara aspek kehandalan, aparat Dinas Perhubungan belum dapat dikatakan telah memenuhi dimensi kualitas kerja dengan baik.

4.1.3. Kekuatan Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam

Penertiban Parkir di Sekitar Jalan Otto Iskandar Dinata

Kekuatan merupakan sumber daya dan kemampuan yang dapat digunakan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif. Kekuatan yang harus dimiliki oleh aparat Dinas perhubungan adalah kesigapan, dan ketegasan dalam penertiban parkir liar dan penertiban pada parkir resmi yang tidak terkelola dengan baik, sedangkan kekuatan yang harus dimiliki juru parkir adalah kesigapan petugas dalam melayani pengguna parkir, mengatur penempatan kendaraan dan juga memberikan jaminan keamanan untuk kendaraan yang diparkir di tempat parkir resmi.

Penertiban parkir liar para petugas dituntut tidak pandang bulu dalam menertibkan kendaraan apapun, dan kendaraan siapapun yang terparkir di tempat parkir terlarang akan ditindak dengan cara dilakukan pengembosan, pengembosan untuk kendaraan roda 4 yang ditinggal pemiliknya dan pengangkutan bagi kendaraan roda 2 yang ditinggal pemiliknya serta penilangan ditempat bagi kendaraan yang kebetulan ada pemiliknya.

Kekuatan fisik petugas dalam sebuah pelaksanaan kinerja merupakan salah satu aspek yang sangat penting, sebenarnya tidak ada ketetapan yang mengatur soal kekuatan fisik petugas, akan tetapi ketika bertugas petugas harus dipastikan berada dalam keadaan sehat.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan, peneliti menemukan terdapat beberapa taksi yang terparkir di kawasan larang parkir seperti didepan gedung pasar baru yang jelas-jelas terdapat rambu dilarang untuk memarkirkan kendaraan lebih diperparah lagi posisi taksi yang terparkir ada dikanan jalan yang jelas-jelas dilarang sekali untuk kendaraan berhenti apalagi memarkirkan kendaraanya. Kondisi tersebut kontras dengan ketentuan yang berlaku yang mengatakan bahwa kegiatan penertiban dilakukan pada semua kendaraan tanpa pandang bulu.

Gambar 4.5

Taksi mengetem didepan rambu dilarang parkir



Sumber: Hasil Observasi Peneliti Tahun 2014

Ketika dilaksanakan SIDAK taksi tersebut hanya dipersilahkan untuk pergi tanpa ada saksi sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap supir taksi yang melanggar. Dari kenyataan yang peneliti lihat di lapangan kekuatan petugas yang dilihat dari ketegasan petugas dalam penertiban parkir liar masih dipertanyakan ketepatannya dan kurang bisa dikatakan baik dalam mendorong dimensi kualitas kerja dinas perhubungan.

4.1.4. Daya seni Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Penertiban Parkir di Sekitar Jalan Otto Iskandar Dinata

Daya seni merupakan salah satu aspek dalam kualitas pelayanan yang tidak bisa diabaikan. Daya seni merupakan sisi estetika di dalam pekerjaan. Dalam hal pengaturan parkir, daya seni dapat diartikan sebagai cara petugas dalam penertiban parkir dengan memperhatikan segi kerapihan dan keindahan dalam mengatur penempatan kendaraan sehingga tempat parkir terlihat rapih dan dengan pengaturan penempatan yang baik dapat memberikan ruang lebih untuk menampung kendaraan lain.

Berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 551/Kep. I40-Dishub/2012 tentang Penetapan Lokasi dan Posisi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir di Kota Bandung, terdapat aturan mengenai posisi parkir yaitu, posisi parkir paralel pada satu sisi jalan (ruas jalan), posisi parkir paralel pada dua sisi jalan atau ruas jalan, posisi parkir 60 derajat pada satu sisi jalan (ruas jalan), Posisi Parkir 45

derajat pada satu sisi jalan atau ruas jalan, Posisi Parkir 30 derajat pada satu sisi jalan atau ruas jalan, dan posisi parkir 30 derajat pada satu sisi jalan atau ruas jalan.

Kegiatan pembinaan juru parkir oleh Dinas Perhubungan dilakukan disaat perekrutan petugas baru namun tidak ada pelaksanaan pembinaan secara berkala terhadap petugas parkir. Petugas tim penertiban mengatur tempat parkir sesuai ketentuan dan memberikan arahan kepada juru parkir, akan tetapi tim penertiban sering menemui kendala dalam mengatur tempat parkir dengan baik yang disebabkan oleh keterbatasan lahan parkir dan daya seni yang kurang dari juru parkir.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan dilapangan, peneliti melihat bahwa posisi penempatan parkir kendaraan di tempat parkir resmi pun masih terlihat belum benar-benar rapih dan teratur, masih ada beberapa kendaraan yang penempatannya terlihat berantakan sehingga menyulitkan masyarakat untuk memarkirkan dan mengambil kendaraannya karena terhalang oleh kendaraan lain.

Pengamatan peneliti didukung oleh pernyataan dari masyarakat pengguna parkir yang berpendapat bahwa penempatan posisi parkir masih kurang baik dan teratur, sehingga terkadang masyarakat kesulitan ketika akan mengambil kendaraan yang diparkir. Dari hasil observasi dan pengamatan tersebut maka diketahui bahwa daya seni petugas dalam penertiban dan pengaturan parkir masih belum mencapai hasil yang optimal.

Gambar 4.6
Lokasi Tempat Parkir Resmi Yang Terlihat Masih Belum Teratur



Sumber: Hasil Observasi Peneliti Tahun 2014

4.2. Ketepatan Waktu Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Penertiban Parkir di Sekitar Jalan Otto Iskandar Dinata

Waktu adalah faktor yang paling berharga dalam melakukan pekerjaan. Waktu yang diperlukan aparatur Dinas Perhubungan adalah waktu yang digunakan dalam kegiatan penertiban parkir liar dan waktu yang digunakan dalam pengawasan pelaksanaan parkir yang tertib di tempat parkir resmi. Ketepatan waktu adalah ketepatan pelaksanaan jadwal kerja dengan waktu yang telah ditentukan. Waktu kerja merupakan lama pelaksanaan kerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah ditargetkan. Indikator dari waktu kerja yaitu jadwal kerja dan lama penyelesaian.

Ketepatan waktu dalam pelayanan parkir, sehingga lahan parkir dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Indikator yang harus diperhatikan dalam waktu tersebut yaitu jadwal, iklim, lama, serta batas waktu penertiban parkir di sekitar jalan Otto Iskandar Dinata, baik jalan, trotoar, maupun bangunan yang ada di sekitar Pasar Baru Bandung, baik di Jalan Otto Iskandar Dinata, Jalan ABC, Jalan Pacinan, Jalan Dulatif, Jalan Belakang Pasar, Jalan Tamim serta tempat lainnya yang berpengaruh kepada kondisi ketertiban masyarakat.

Untuk mengetahui aspek-aspek dalam ketepatan waktu Dinas perhubungan Kota Bandung, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dan juga melakukan observasi lapangan untuk mengetahui praktek nyata yang terjadi dalam pelaksanaan penertiban parkir di Jalan Otto Iskandar Dinata.

Ketepatan Waktu merupakan salah satu dimensi penting dalam mengukur baik atau tidaknya kinerja. Dimensi ketepatan waktu memiliki tiga aspek penting yang dapat dijadikan pengukuran. Aspek tersebut antara lain adalah jadwal kerja dan lama penyelesaian. Aspek jadwal kerja dan aspek penyelesaian pekerjaan masih belum dapat dikatakan baik karena terdapat ketidaksesuaian antara waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam jadwal kerja dengan praktek dan pelaksanaan dilapangan. Ketepatan waktu dalam pengukuran kinerja dinas perhubungan dalam penertiban parkir di sekitar jalan otto iskandar dinata masih belum optimal baik dalam penertiban parkir liar maupun penertiban parkir resmi untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

4.2.1. Jadwal kerja Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Penertiban Parkir di Sekitar Jalan Otto Iskandar Dinata

Jadwal kerja merupakan salah satu aspek dalam dimensi ketepatan waktu yang harus dipenuhi karena dengan adanya jadwal kerja yang efektif dan kedisiplinan petugas dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditetapkan akan sangat berpengaruh pada hasil kinerja.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan aparatur Dinas perhubungan, diperoleh keterangan bahwa dalam penertiban parkir, terdapat pembagian waktu untuk para petugas. Pembagian waktu tersebut meliputi plotting dan sosialisasi, petugas dibagi kedalam empat shif.

Selanjutnya Aparatur UPT Parkiran menjelaskan bahwa, Penertiban plotting dilakukan pada Hari Jumat, Sabtu dan Minggu dari pukul Sembilan pagi sampai pukul lima sore, Setiap shift memiliki waktu kerja dua jam, sedangkan penertiban mobile dilakukan dari hari Senin sampai Kamis.

Adapun jadwal kerja tim penertiban secara lebih rinci adalah Penertiban plotting dilaksanakan pada hari Jum'at-Sabtu-Minggu shift pertama mulai dari jam 09,00 s/d 11.00 dan shift kedua mulai jam 11.00 s/d 13.00 (sosialisasi) dilanjutkan Shift ketiga mulai jam 13.00 s/d 15.00 dan Shift keempat mulai jam 15.00 s/d 17.00 (sosialisasi), Penertiban *Hunting* secara *mobile* dilakukan hari Senin sampai Kamis.

Kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat diperlukan untuk memberikan penerangan mengenai peraturan parkir yang meliputi sosialisasi daerah larang parkir, dan juga anjuran untuk parkir di tempat parkir resmi. Sosialisasi tersebut dilakukan

melalui media elektronik seperti radio, media cetak seperti koran spanduk dan surat edaran.

Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan di lapangan, peneliti menemukan fakta bahwa dalam kegiatan plotting, keberadaan petugas dilapangan tidak sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditentukan, petugas tidak ada di lapangan dari pagi sampai sore melainkan hanya beberapa jam saja. Kemudian mengenai kegiatan *hunting* atau penertiban *mobile*, menurut jadwal yang telah ditetapkan, kegiatan tersebut di mulai dari jam 9 pagi hingga jam 5 yang dilakukan secara bergantian oleh tim yang terdiri dari 4 shift, namun pada kenyataannya kegiatan penertiban mobile tersebut hanya dilakukan sebanyak satu kali saja.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, bila dilihat dari aspek jadwal kerja, apartur Dinas Perhubungan belum dapat dikatakan telah memenuhi dimensi Ketepatan Waktu dengan baik.

4.2.2. Lama Penyelesaian Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Penertiban Parkir di Sekitar Jalan Otto Iskandar Dinata

Ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penundaan yang menyebabkan penumpukan volume pekerjaan dapat dihindari. Lama penyelesaian pekerjaan harus ditetapkan sehingga petugas dapat mengetahui batas waktu penyelesaian pekerjaannya dan dapat membuat target.

Dinas Perhubungan memiliki ketentuan mengenai lama penyelesaian pekerjaan dalam kegiatan penertiban parkir, seperti yang dikatakan oleh aparatur dinas perhubungan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, lama penyelesaian pekerjaan setiap shift dalam tim penertiban parkir adalah selama 2 jam sampai kemudian bergilir dengan shift berikutnya.

Adapun informasi mengenai kegiatan, tim gembok aparatur UPT Parkir mengatakan lama penyelesaian kegiatan pengembokan, pengembosan dan pengangkutan kendaraan sangat relatif dan tidak dapat ditentukan karena hal tersebut tergantung pada banyaknya kendaraan yang diparkir di tempat parkir liar dan tidak dapat ditentukan sampai kapan penertiban ini akan berlangsung dan penertiban ini akan selalu dilaksanakan selama masih adanya parkir liar.

Adapun mengenai lama waktu parkir, Berdasarkan kebijakan Pemerintah melalui Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No 25/DJP/Kpts/1998 tentang penyelenggaraan parkir, terdapat kebijakan tentang pembatasan waktu parkir yaitu penetapan waktu parkir maksimal, yang biasanya dilakukan pada parkir dipinggir jalan dengan menggunakan mesin parkir. Dalam hal ini parkir untuk waktu yang panjang tidak diijinkan, parkir diarahkan untuk jangka pendek misalnya parkir untuk makan siang atau parkir untuk belanja di toko.

Penetapan larangan parkir pada waktu-waktu tertentu, misalnya dilarang parkir pada jam sibuk pagi atau jam sibuk sore. Dalam hal ini jalan lebih diperuntukkan untuk mengalirkan arus lalu lintas. Penetapan seperti ini biasanya dilakukan untuk jalan-jalan yang masih diijinkan untuk parkir dipinggir jalan tetapi

kapasitas jalannya terbatas sehingga untuk meningkatkan kapasitas pada waktu-waktu tertentu maka parkir dipinggir jalan dilarang.

Mengenai ketentuan ini, petugas penertiban menjelaskan bahwa pihaknya kesulitan untuk melaksakana aturan tersebut karena lama orang memarkirkan kendaraannya sulit untuk ditentukan, hal tersebut kembali lagi pada kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan.

Dari hasil observasi yang dilakukan dilapangan, peneliti menemukan bahwa lama penyelesaian pekerjaan petugas penertiban tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dalam jadwal telah tercantum dengan jelas bahwa lama kegiatan penertiban setiap shift adalah bergiliran setiap dua jam dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore, namun pada kenyataannya sebelum waktu yang telah ditentukan, tim penertiban sudah menghentikan kegiataannya.

Peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa secara aspek lama penyelesaian penertiban parkir liar maupun parkir resmi, apartur Dinas Perhubungan belum dapat dikatakan telah memenuhi dimensi ketepatan waktu.

4.3. Kemampuan Kerja Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Penertiban Parkir di Sekitar Jalan Otto Iskandar Dinata

Kemampuan kerja merupakan kesanggupan petugas untuk melakukan pekerjaan secara konsepsional dan teknik operasiaonal. Kemampuan kerja dapat ditandai dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan. kemampuan kerja sesuai keahliannya dengan indikator keahlian, sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam

penertiban parkir liar di sekitar Jalan Otto Iskandar Dinata, terutama di sekitar pasar baru seperti Jalan ABC, Jalan Pacinan, Jalan Dulatif, Jalan Belakang Pasar, Jalan Tamim serta tempat lainnya yang berpengaruh kepada kondisi ketertiban masyarakat.

Dimensi kemampuan kerja merupakan salah satu faktor penting yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kinerja. Dimensi kemampuan kerja aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung dapat dikur oleh aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. Aspek pengetahuan aparatur dalam pelaksanaan penertiban Parkir liar sudah cukup baik walaupun masih terkendala oleh kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, aspek sikap masih belum terpenuhi dengan baik karena dilapangan masih ditemukan sikap petugas yang kurang menyenangkan. Aspek keterampilan sudah cukup terpenuhi, namun masih terkendala oleh keterbatasan sarana, prasarana dan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil dari aspek-aspek tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dimensi kemampuan kerja sudah cenderung tercapai dengan baik walaupun masih perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan pada aspek sikap, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

4.3.1. Pengetahuan Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Penertiban Parkir di Sekitar Jalan Otto Iskandar Dinata

Pengetahuan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam dimensi kemampuan kerja. Seorang pegawai atau petugas harus memiliki pengetahuan yang luas khususnya yang berkenaan dengan pekerjaannya sehingga petugas tersebut dapat

benar-benar memahami pekerjaannya dan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan tepat.

Mengenai pengetahuan aparaturnya Dinas Perhubungan dalam penertiban parkir, bahwa pengetahuan aparaturnya dinas perhubungan selalu berusaha dipupuk dengan dilakukannya pembinaan dan pelatihan.

Dalam penertiban parkir liar, peran juru parkirpun tidak dapat diabaikan. Untuk dapat membantu penertiban parkir, juru parkir harus memiliki pengetahuan yang berkenaan dengan aturan dan tata cara memarkir dan mengatur penempatan parkir yang baik dan benar, dalam hal ini aparaturnya Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi dan pembinaan pada juru parkir dilapangan agar dapat mengetahui dan memahami tugas-tugasnya dalam membantu menertibkan parkir, hal tersebut berkenaan dengan tata-tata cara dan aturan memarkir.

Sedangkan juru parkir dilapangan mengatakan bahwa pembinaan pernah dilakukan namun jarang, pengetahuan mengenai cara memarkir lebih banyak berdasarkan pengalaman langsung (Otodidak).

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan penertiban parkir liar aparaturnya tim penertiban Dinas Perhubungan terlihat sudah cukup memahami pekerjaannya dan dilihat daritingkat pendidikan petugasnya minimal adalah SMA. Tetapi ritme waktu tim penertiban dalam memberikan pembinaan berkala kepada juru parkir masih kurang itu terbukti dari juru parkir yang lebih memahami dalam cara memarkirkan kendaraan yang parkir secara otodidak dan Hasil observasi mengenai juru parkir, peneliti melihat bahwa pengetahuan tim

penertiban dinas perhubungan dengan juru parkir dalam mengatur parkir sudah cukup baik walaupun masih terkendala oleh minimnya fasilitas, sarana dan prasarana.

4.3.2. Sikap Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Penertiban Parkir di Sekitar Jalan Otto Iskandar Dinata

Sikap merupakan salah satu aspek penting dalam dimensi kemampuan kerja. Sikap merupakan cerminan pribadi petugas dalam menjalankan pekerjaannya, baik buruknya sikap yang dilakukan oleh petugas dapat mempengaruhi persepsi dan rasa hormat masyarakat, sikap juga dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tercapai atau tidaknya hasil kerja yang maksimal. Secara umum, pengertian sikap (*attitude*) adalah perasaan, pikiran, dan kecenderungan petugas yang kurang lebih bersifat permanen mengenal aspek-aspek tertentu dalam lingkungannya penertiban parkir. Komponen-komponen sikap adalah pengetahuan, perasaan-perasaan, dan kecenderungan untuk bertindak dalam penertiban.

Dalam pengertian yang lain, sikap adalah kecondongan evaluatif terhadap suatu objek atau subjek yang memiliki konsekuensi yakni bagaimana seseorang berhadapan dengan objek sikap. Tekanannya pada kebanyakan penelitian dewasa ini adalah perasaan atau emosi. Sikap yang terdapat pada diri individu akan memberi warna atau corak tingkah laku ataupun perbuatan individu yang bersangkutan. Dengan memahami atau mengetahui sikap individu, dapat diperkirakan respons ataupun perilaku yang akan diambil oleh individu yang bersangkutan.

Mengenai sikap aparatur Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan penertiban parkir sebenarnya tidak ada ketentuan khusus yang mengatur sikap petugas, namun petugas dihimbau untuk bersikap sopan santun dalam melaksanakan pekerjaannya tetapi tetap tegas dalam bertindak. Aparatur Dinas Perhubungan dituntut untuk selalu mempunyai sikap komitmen dalam melaksanakan tugas penertiban parkir sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Komitmen Aparatur merupakan kondisi dimana petugas penertiban adalah aparatur dinas perhubungan sendiri sangat tertarik terhadap pelaksanaan penertiban, nilai-nilai, dan sasaran dari penertiban. Komitmen petugas penertiban lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai tim penertiban dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan tim penertiban demi pencapaian tujuan dalam penertiban parkir liar maupun dalam penertiban parkir resmi yang belum terkelola dengan baik. Jika sikap aparatur bertentangan dengan pandangan mereka maka proses penertiban tidak akan berjalan dengan efektif.

Mengenai sikap juru parkir dalam membantu mengatur dan menertibkan kendaraan di tempat parkir resmi, tidak ada aturan mengenai sikap, tapi juru parkir selalu berusaha bersikap ramah dan sopan terhadap masyarakat yang memarkirkan kendaraannya supaya masyarakat lebih tertarik memarkirkan kendaraannya ditempat parkir resmi dibanding dengan memarkirkan kendaraannya di tempat parkir liar.

Persepsi masyarakat mengenai sikap petugas parkir apartur Dinas Perhubungan dalam penertiban parkir. Menurut masyarakat petugas sering bersikap tidak ramah, bahkan terkesan kasar saat membantu mengeluarkan kendaraan. Hasil observasi yang

peneliti lakukan dilapangan, peneliti menemukan bahwa sikap petugas sangat beragam, ada yang memang ramah ada yang tidak, hal tersebut tergantung pada pribadinya masing-masing. Jadi dalam aspek sikap dalam meningkatkan mutu Kemampuan kerja belum terpenuhi dengan baik, karena masih terkendala kepribadian masing-masing para petugas yang berbeda dan kurang menyenangkan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna jasa parkir.

4.3.3. Keterampilan Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Penertiban Parkir di Sekitar Jalan Otto Iskandar Dinata

Keterampilan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari kemampuan kerja dalam rangka meningkatkan kinerja seorang aparatur maka salah faktor penunjang adalah tingkat keterampilan aparatur itu sendiri. Semakin tinggi tingkat keterampilan seorang aparatur, maka akan dapat meningkatkan kinerja. Hasil kerja akan dapat memenuhi target dan sararan yang harus dicapai dalam penertiban parkir apabila petugas memiliki keterampilan yang baik dalam melaksanakan penertiban. Keterampilan petugas dapat ditingkatkan melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan. ketrampilan juga membutuhkan kemampuan dasar untuk melakukan pekerjaan secara mudah dan tepat. Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan berarti kemampuan untuk mengoperasikan suatu penertiban parkir secara mudah dan cermat yang membutuhkan kemampuan dasar dalam penertiban.

Mengenai keterampilan aparaturnya Dinas Perhubungan dalam penertiban Parkir, keterampilan petugas dalam penertiban parkir sudah cukup baik, pengawasan yang dilakukan oleh koordinator untuk mengetahui bagaimana kinerja petugas dilapangan apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum, pembinaan dan pelatihan yang jarang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan karena kegiatan penertiban dianggap suatu pekerjaan yang mudah meskipun tanpa pelatihan dan pembinaan yang berkala akan tetap berajalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penertiban oleh aparaturnya Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan kegiatan penertiban parkir.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan dilapangan, peneliti menemukan bahwa keterampilan petugas dalam menertibkan parkir sudah cukup baik. Petugas terlihat sudah sangat mengerti apa yang harus dilakukan dan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan telaten. Namun pada juru parkir peneliti melihat bahwa sebenarnya keterampilan juru parkir untuk mengatur keluar masuk kendaraan dan mengatur penempatan posisi kendaraan sudah cukup baik, namun kurangnya sumber daya manusia dan sarana juga prasarana menyebabkan juru parkir nampak kewalahan dan tidak bisa menangani dan melayani secara merata semua orang yang memarkirkan kendaraannya di tempat parkir resmi. Jadi dalam aspek keterampilan dalam meningkatkan kemampuan kerja dalam penertiban sudah cukup terpenuhi, namun masih terkendala oleh keterbatasan sarana, prasarana dan sumber daya manusia.

4.4. Inisiatif Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Penertiban Parkir di Sekitar Jalan Otto Iskandar Dinata

Inisiatif dapat diartikan sebagai tindakan untuk mencari kemudahan dan kecepatan dalam pelaksanaan kerja untuk mencari cara kerja yang paling mudah dan paling cepat. Inisiatif ditandai dengan memiliki rasa ingin bisa, rasa ingin tahu, lebih mudah, lebih cepat, kepedulian.

Inisiatif merupakan kesesuaian antara aktivitas yang dilakuakn dengan wewenangan dan tanggung jawab berdasarkan peraturan. Kreativitas yaitu tidak menunggu kesulitan, tetapi petugas harus sudah ada sebelum lahan parkir liar digunakan, sehingga akan membatasi jumlah parkir dan tidak menjadikan kondisi jalan sekitar Otto Iskandar Dinata tidak tertib karena parkir liar.

Inisiatif merupakan salah satu dimensi penting dalam Kinerja, karena dengan adanya inisiatif dari para petugas maka akan diperoleh hasil kerja yang maksimal. Dalam dimensi insisiatif, terdapat tiga aspek utama yang dapat mengukur inisiatif aparatur Dinas Perhubungan dalam penertiban Parkir liar, aspek tersebut antara lain adalah, aspek Kepedulian, tanggung jawab, dan kemauan.

Dimensi insiatif memiliki tiga aspek penting yaitu kepedulian, tanggung jawab dan kemauan. Aspek kepedulian masih belum terpenuhi secara maksimal, hal tersebut ditunjukkan oleh kekurang kepedulian petugas penertiban yang bertugas berjaga untuk mengawasi tidak selau ada di tempat dan juru parkir dalam membantu masyarakat dalam memarkirkan kendaraannya dan kurangnya kegiatan sosialisasi. Berdasarkan aspek tanggung jawab, tanggung jawab Aparatur Dinas Perhubungan

Kota Bandung dalam penertiban parkir liar sudah cukup baik walaupun masih perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi. Aspek kemauan cenderung mengarah ke arah positif, hal tersebut ditunjukkan oleh kemauan aparatur Dinas Perhubungan untuk terus berkerja dalam penertiban parkir liar. Dapat disimpulkan bahwa dimensi inisiatif dalam mendukung kinerja aparatur dinas perhubungan dalam melakukan penertiban masih berjalan kurang optimal untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

4.4.1. Kepedulian Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Penertiban Parkir di Sekitar Jalan Otto Iskandar Dinata

Kepedulian merupakan salah satu aspek penting dalam dimensi inisiatif Aparatur Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan penertiban parkir liar. Melalui aspek kepedulian, akan dapat terlihat sejauh mana kepedulian petugas terhadap pekerjaannya dan juga kepedulian petugas terhadap masyarakat. Kepedulian terhadap keakuratan tujuan adalah dorongan untuk mengurangi ketidak pastian dalam suatu lingkungan. Hal ini tampak dalam bentuk pemantauan dan pemeriksaan pekerjaan dan menekankan pada kejelasan peran.

Mengenai kepedulian Aparatur Dinas Perhubungan dalam penertiban parkir liar, kepedulian petugas terhadap pekerjaannya belum cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan pekerjaan belum sesuai dengan aturan dan ketetapan yang berlaku, pemahaman tentang tujuan dari pelaksanaan penertiban tersebut juga menambah aspek kepedulian aparatur Dinas Pehubungan. Namun dalam Pelaksanaanya tersebut belum sesuai dengan prosedur, karena dalam pelaksanaan

penertiban parkir liar adanya petugas yang berjaga ditempat-tempat rawan parkir liar dan rawan terjadi kemacetan yang disebabkan parkir petugas kurang peduli dalam melaksanakan pengawasan terhadap kondisi parkir itu sendiri dan kurang dalam melakukan sosialisai kepada masyarakat.

Mengenai kepedulian juru parkir dalam melaksanakan tugasnya yang sangat berpengaruh terhadap penertiban parkir liar itu sendiri, kepedulian juru parkir terhadap masyarakat ditunjukkan dengan upaya juru parkir dalam membantu masyarakat yang kesusahan dalam memarkirkan kendaraannya, namun keterbatasan kuantitas SDM merupakan kendala bagi juru parkir sehingga tidak dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di tempat parkir resmi.

Umumnya masyarakat memiliki persepsi bahwa bahwa kepedulian petugas dirasa masih kurang, hal tersebut ketika petugas seolah tidak mau membantu ketika masyarakat kebingungan memarkirkan kendaraan di tempat parkir resmi, dan ketika masyarakat terpaksa untuk parkir di tempat parkir liar, masyarakat ditindak tanpa adanya sosialisasi dan peringatan terlebih dahulu.

Kepedulian aparaturnya Dinas perhubungan dalam pelaksanaan penertiban parkir liar masih belum maksimal, hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya beberapa petugas penertiban yang bertugas berjaga didaerah rawan terjadinya parkir liar dalam melakukan pengawasan yang terlihat diam saja atau tidak selalu adaditempat ketika bertugas, padahal masih dalam waktu kerja. Dapat disimpulkan dari aspek kepedulian

dalam mengukur inisiatif kinerja dinas perhubungan kota bandung dalam penertiban parkir dirasa masih belum maksimal.

4.4.2. Tanggung Jawab Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Penertiban Parkir di Sekitar Jalan Otto Iskandar Dinata

Tanggung Jawab merupakan salah satu aspek penting dalam dimensi insiatif, berhasil atau tidaknya kinerja pegawai dapat diukur dari tingkat tanggung jawab yang dimiliki pegawai atau petugas terhadap pekerjaannya.

Aparatur Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam penertiban parkir liar, maupun dalam pengelolaan tempat parkir resmi tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab terhadap pekerjaan maupun tanggungjawab moral terhadap masyarakat.

Mengenai tanggungjawab petugas dalam pelaksanaan penertiban parkir liar, Aparatur Dinas Perhubungan bertanggung jawab pada tugas-tugas yang telah ditetapkan dan juga bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang dilakukan. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan tugas sesuai prosedur, dan melayani masyarakat. Sesudah kegiatan sidak oleh tim penertiban akan diteruskan untuk proses pengambilan kendaraan yang diangkut, juga melakukan pembinaan terhadap masyarakat melalui sosialisasi ditempat penulisan BAP dan pengambilan kunci gembok.

Petugas selalu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibrikan oleh atasan , dan petugas bertanggung jawab juga atas setiap tindakan yang

dilakukan. Bentuk tanggung jawab tersebut salah satunya dilakukan melalui ketegasan memberi dan menerima sanksi apabila ada pelanggaran.

Mengenai tanggung jawab, bentuk tanggung jawab juru parkir dalam melaksanakan tugasnya dilapangan ditunjukkan dengan selalu berusaha menjaga kendaraan yang diparkir dan berusaha mengingatkan masyarakat untuk mengamankan kendaraannya.

Masyarakat memiliki persepsi bahwa tanggung jawab dari Dinas Perhubungan dirasa masih kurang, karena tindakan pengembokan dan pengangkutan kendaraan dilakukan tanpa sosialisasi yang menyeluruh, dan sistem keamanan ditempat parkir dirasa masih sangat kurang dalam mengamankan kendaraan dari praktek curanmor.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan, diketahui bahwa Aparatur Dinas Perhubungan sudah cukup baik dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam penertiban parkir liar , namun perlu dilakukan sosialisasi yang lebih gercar dan menyeluruh sehingga masyarakat dapat lebih bisa menerima dan memahami peraturan yang berlaku.

4.4.3. Kemauan Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Penertiban Parkir di Sekitar Jalan Otto Iskandar Dinata

Kemauan merupakan dorongan secara pribadi yang muncul dari diri seseorang untuk bertidak atau melakukan sesuatu seperti rasa ingin bisa, rasa ingin tahu lebih mudah dan lebih cepat dalam menyelesaikan atau mencapai tujuan. Kemauan untuk

bekerja dan melaksanakan tugas dan kewajiban, merupakan salah satu aspek yang dapat mendukung keberhasilan kinerja.

Mengenai kemauan Aparatur Dinas Perhubungan untuk melaksanakan pekerjaannya dalam penertiban parkir liar, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, semangat dan kemauan Aparatur dinas Perhubungan cukup besar, di setiap Tim dibentuk juga koordinator untuk memonitor kinerja aparatur di lapangan. Selanjutnya kemauan dari aparatur Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya selalu senantiasa dipupuk dengan diberinya motivasi-motivasi secara langsung maupun tidak langsung oleh koordinator tim.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan, tim penertiban dan petugas parkir hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan intruksi dari koordinator tim, disini menuntut koordinator tim harus lebih bisa berinisiatif dalam menciptakan solusi-solusi baru dalam penertiban parkir namun pada nyatanya kegiatan penertiban hanya terfokus pada permasalahan luar seperti melakukan penertiban terhadap pengendara yang memarkirkan kendaraanya sembarangan tanpa menyelesaikan akar dari permasalahan tersebut seperti melakukan penertiban terhadap sarana dan prasarana fasilitas parkir resmi yang kiranya sudah tidak bisa mendukung dalam ketertiban dan kenyamanan fasilitas parkir seperti ruang parkir yang kurang, marka parkir yang mulai hilang dan pemberian mesin parkir elektronik disetiap tempat parkir resmi. Diketahui bahwa aspek kemauan Aparatur Dinas Perhubungan untuk melaksanakan pekerjaannya cukup baik sesuai dengan instruksi koordinator tim namun kemampuan koordinator tim dalam melakukan inisiatif baru

untuk menciptakan solusi baru dalam penertiban parkir masih kurang, hal tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan kegiatan penertiban yang masih dilakukan tetapi tidak ada kemajuan dalam solusi untuk penertiban parkir.

4.5. Komunikasi Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Penertiban Parkir di Sekitar Jalan Otto Iskandar Dinata

Komunikasi kerja dapat diartikan adalah hubungan kerja antara atasan dengan atasan, atasan dengan bawahan dan bawahan dengan bawahan untuk memudahkan proses kerja. Komunikasi dalam penertiban parkir liar tidak dapat dilakukan oleh hanya satu pihak atau satu unit kerja tertentu saja, karena ada yang berkepentingan dengan keberadaan parkir dan pengaruhnya terhadap kondisi, seperti Polisi Lalu lintas, Trayek Jalan, pengangkutan pasokan komoditi ke pasar unit organisasi lainnya yang berkepentingan. Komunikasi sangat dibutuhkan dalam penertiban parkir, karena antara Dinas Perhubungan, Kepolisian, Aparat TNI dan Polisi Pamong Praja, dan UPT parkir Dinas Perhubungan harus berkerja sejalan dengan penertiban parkir di sekitar jalan Otto Iskandar Dinata.

Dalam mengukur dimensi komunikasi terdapat tiga aspek penting yang dapat menjadi ukuran baik tidaknya komunikasi kerja yang dilakukan oleh Aparatur Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan penertiban parkir liar. Ketiga Aspek tersebut antara lain adalah kerjasama, hubungan kerja, dan keharmonisan.

Dalam pengukuran kinerja, komunikasi merupakan dimensi salah satu dimensi yang paling penting. Dalam dimensi komunikasi terdapat tiga aspek penting

yaitu kerjasama, hubungan kerja dan keharmonisan. Aspek kerjasama dan hubungan kerja antara Dinas Perhubungan dengan pihak lain terjalin dengan baik. aspek keharmonisan cenderung baik namun perlu ditingkatkan keharmonisan dengan masyarakat. Berdasarkan aspek – aspek tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dimensi komunikasi telah tercapai dengan cukup baik walaupun ada keharmonisan dengan masyarakat masih perlu ditingkatkan.

4.5.1. Kerjasama Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Penertiban Parkir di Sekitar Jalan Otto Iskandar Dinata

Kejasama dalam suatu pekerjaan mutlak dibutuhkan, tanpa adanya kerjasama, tujuan dari sebuah proses kinerja tidak mungkin akan dapat tercapai dengan baik. Setiap individu yang bekerja memiliki keterbatasan, maka dibutuhkanlah kerjasama dalam tim untuk dapat saling melengkapi sehingga tujuan dan hasil keinerja akan dapat dicapai.

Mengenai kerjasama aparatur Dinas Perhubungan dalam penertiban parkir, aparatur Dinas perhubungan menjelaskan dalam pelaksanaan penertiban Pakir liar Dinas perhubungan melakukan kerjasama dengan pihak pihak lain seperti Satpol PP Kota Bandung, Polrestabes Kota Bandung, Polisi Militer (PM), Polisi Pamong Praja kerjasama juga dilakukan dengan masyarakat yang melaporkan lokasi-lokasi tempat terjadinya parkir liar. Selanjutnya Aparatur UPT Parkir mengatakan bahwa didalam Penertiban Parkir liar bekerja sama dengan pihak-pihak lain, kami juga membuka kerjasama dengan masyarakat yang ingin melapor lokasi-lokasi terjadinya parkir liar.

Penertiban parkir liar terlihat ada kerjasama antara Dinas Perhubungan dengan aparat-aparat pemerintah lainnya seperti seperti Satpol PP Kota Bandung, Polrestabes Kota Bandung, Polisi Militer (PM) dan dalam aspek kerjasama aparatur Dinas Perhubungan telah bisa dinilai baik dalam memenuhi dimensi komunikasi.

Gambar 4.7
Kegiatan Hunting



Sumber: Hasil Observasi Peneliti Tahun 2014

4.5.2. Hubungan kerja Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Penertiban Parkir di Sekitar Jalan Otto Iskandar Dinata

Hubungan Kerja merupakan bagaimana tata cara maupun aturan dalam bekerja sama. Hubungan kerja yang baik antar pihak-pihak terkait tentu akan dapat menunjang keberhasilan kinerja. Hubungan kerja dapat disebut juga sebagai hubungan professional. Hubungan kerja antar petugas maupun dengan pihak lainnya

terjalin dengan baik. masing-masing pihak mengerti tugas dan wewenangnya masing-masing dan juga menghormati tugas dan wewenang rekannya.

Hubungan kerja dengan pihak-pihak terkait berlangsung dengan baik dan profesional. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan peneliti melihat bahwa hubungan kerjasama antar pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan penertiban parkir liar berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh pembagian tugas yang jelas dan berdasarkan prosedur.

Tim gembok gabungan yang terdiri dari Dishub Kota Bandung, Satpol PP Bandung, TNI, Polri yang melakukan penggembokan dan pengangkutan kendaraan yang melanggar aturan parkir, selanjutnya diproses oleh Tim BAP ketika pemilik kendaraan tersebut melapor untuk pengambilan kendaraannya kemudian proses selanjutnya dilakukan persidangan dikejaksaan. Dari Proses tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja Aparatur Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan penertiban parkir liar terjalin dengan baik.

4.5.3. Keharmonisan Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Penertiban

Parkir di Sekitar Jalan Otto Iskandar Dinata

Keharmonisan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam dimensi komunikasi. Komunikasi akan berjalan dengan baik apabila antar petugas atau pegawai memiliki hubungan yang harmonis satu sama lain dan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa komunikasi yang baik merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan kinerja.

Mengenai keharmonisan antar Aparat Dinas Perhubungan dalam penertiban parkir liar, keharmonisan hubungan antar sesama petugas dan juga antar pihak lain terjalin dengan cukup baik, hal tersebut dibuktikan dengan komunikasi yang baik dan juga hasil kerja sesuai dengan yang direncanakan disaat penyusunan tempat target operasi .

Hubungan kerja antar semua pihak terkait terjalin dengan harmonis,selalu berusaha untuk menjaga kekompakan. Keharmonisan antar sesama petugas dan pihak-pihak apatur pemerintah lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan penertiban parkir liar terjalin dengan baik, namun keharmonisan tersebut tidak berlaku untuk sebagian masyarakat, masyarakat sering mengeluhkan tindakan petugas yang melakukan penggembokan dan pengangkutan tanpa adanya sosialisasi yang memadai dan menyeluruh. Dalam aspek kerjasama dalam mendorong dimensi komunikasi di dalam penertiban parkir masih harus ditingkatkan terutama dengan masyarakat.